

**PERAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PROSES KEBIJAKAN
PUBLIK DI DESA PERKEBUNAN GELUGUR KECAMATAN SALAPIAN
KABUPATEN LANGKAT**

Pingky Monica Hasugian¹, Depi Yohana Manurung², Limra G.M Nababan³, Tessa
Lonika Simanullang⁴, Halking⁵

¹PPKn FIS Universitas Negeri Medan

²PPKn FIS Universitas Negeri Medan

³PPKn FIS Universitas Negeri Medan

⁴PPKn FIS Universitas Negeri Medan

Alamat e-mail : 1hasugianpingkymonica@gmail.com,
2depimanurung3003@gmail.com, 3limranababan@gmail.com,
4tessa084@gmail.com, 5halking123@unimed.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the form of village community participation in the public policy process, the challenges faced by the village government in encouraging community participation in the public policy process, and the influence of village community participation in the public policy process in Gelugur Plantation Village, Salapian District, Langkat Regency. Where Gelugur Plantation Village, Salapian District, Langkat Regency, is one of the villages that handles issues regarding the Village Decision. As a village with a fairly dense population and diverse community backgrounds. Where the selected community has diverse characteristics, such as farmers, traders and other workers. The research method used is qualitative descriptive research with data collection through observation, interviews, documentation. The research location was carried out in Gelugur Plantation Village, Salapian District, Langkat Regency. In this study, the informants used were the village head and 15 community members. Using data analysis techniques, namely data reduction, data presentation, and data verification. In this research, high community participation makes village policies more targeted, easier to implement, and gain broad support from residents, where community participation has a very important role in determining the quality and success of public policies in the village. Community participation is seen through their active involvement in deliberations at the hamlet level to village deliberations, providing proposals for development programs, and implementing activities through mutual cooperation and cooperation in physical development and community empowerment. However, the village government still faces several obstacles in encouraging more optimal participation, such as the low understanding of some residents regarding policy mechanisms, the level of community busyness in daily work, and limited information received by the community regarding village assistance rules and procedures.

Keywords: *public participation, public policy process, challenges of participation*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk partisipasi masyarakat desa dalam proses kebijakan publik, tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat pada proses kebijakan publik, serta pengaruh partisipasi masyarakat desa dalam proses kebijakan publik Di Desa Perkebunan Gelugur Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat. Dimana Desa Perkebunan Gelugur Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, merupakan salah satu desa yang menghadapi persoalan tentang Keputusan desa tersebut. Sebagai desa dengan jumlah penduduk yang cukup padat serta latar belakang masyarakat yang beragam. Dimana Masyarakat yang di pilih memiliki karakteristik yang beragam, seperti petani, pedagang dan pekerja lainnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Perkebunan Gelugur Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat. Dalam penelitian ini informan yang digunakan yaitu kepala desa dan masyarakat yang berjumlah 15 orang. Menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Pada hasil penelitian ini Tingginya partisipasi masyarakat menjadikan kebijakan desa lebih tepat sasaran, lebih mudah dilaksanakan, serta mendapatkan dukungan luas dari warga yang dimana partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas dan keberhasilan kebijakan publik di desa. Partisipasi warga terlihat melalui keterlibatan aktif mereka dalam musyawarah di tingkat dusun hingga musyawarah desa, pemberian usulan terhadap program pembangunan, serta pelaksanaan kegiatan melalui gotong royong dan kerja sama dalam pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat. Namun, pemerintah desa masih menghadapi beberapa kendala dalam mendorong partisipasi yang lebih optimal, seperti rendahnya pemahaman sebagian warga mengenai mekanisme kebijakan, tingkat kesibukan masyarakat dalam pekerjaan sehari-hari, serta keterbatasan informasi yang diterima oleh masyarakat terkait aturan dan prosedur bantuan desa.

Kata Kunci: *partisipasi masyarakat, proses kebijakan publik, tantangan partisipasi*

A. Pendahuluan

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Partisipasi bukan hanya dimaknai

sebagai kehadiran masyarakat dalam forum-forum resmi, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi kebijakan publik. Melalui

partisipasi, masyarakat berperan sebagai subjek yang menentukan arah pembangunan, bukan sekadar sebagai objek penerima manfaat. Dengan demikian, kualitas kebijakan publik sangat bergantung pada sejauh mana partisipasi masyarakat dapat diwujudkan secara nyata.

Di Indonesia, semangat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, dalam praktiknya, tingkat partisipasi masyarakat sering kali masih rendah. Banyak warga desa yang kurang memahami prosedur dan mekanisme musyawarah, sehingga mereka enggan atau tidak terbiasa menyampaikan aspirasi secara terbuka. Tidak jarang partisipasi hanya sebatas formalitas, tanpa adanya keterlibatan yang bermakna. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan pemerintah desa dengan kebutuhan riil masyarakat. Jika hal ini terus terjadi, maka tujuan pembangunan partisipatif sebagaimana yang diamanatkan undang-undang tidak akan tercapai secara optimal.

Desa Perkebunan Gelugur Kecamatan Salapian Kabupaten

Langkat, merupakan salah satu desa yang menghadapi persoalan tentang Keputusan desa tersebut. Sebagai desa dengan jumlah penduduk yang cukup padat serta latar belakang masyarakat yang beragam, Medan Estate memiliki kebutuhan pembangunan yang kompleks. Mulai dari sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi, semua menuntut perencanaan dan kebijakan yang tepat sasaran. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan Keputusan desa untuk penyusunan kebijakan pengawasan program-program desa.

Di sisi lain, pemerintah desa juga menghadapi tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Keterbatasan sumber daya manusia, minimnya strategi komunikasi yang efektif, rendahnya kesadaran politik warga, serta pengaruh budaya yang membuat sebagian masyarakat enggan menyuarakan pendapat menjadi hambatan yang nyata. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya kualitas kebijakan publik desa karena tidak sepenuhnya berlandaskan pada kebutuhan masyarakat luas. Padahal, partisipasi masyarakat memiliki pengaruh besar

terhadap keberhasilan pembangunan desa. Pertama, kebijakan publik akan lebih berkualitas karena lahir dari aspirasi warga yang langsung merasakan permasalahan sehari-hari. Kedua, keterlibatan masyarakat akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa dalam pembuatan Keputusan desa, sehingga potensi penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir. Ketiga, dengan adanya partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan, sehingga lebih mendukung pelaksanaannya secara berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan berbagai persoalan dan tantangan tersebut, perlu dilakukan kajian mengenai Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik Di Desa Perkebunan Gelugur Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat. Penelitian ini penting karena dapat memberikan gambaran tentang bagaimana bentuk partisipasi masyarakat yang terjadi, hambatan atau tantangan yang dihadapi pemerintah desa terhadap keputusan desa, serta sejauh mana partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap Keputusan desa atau kualitas kebijakan publik. Selain itu, hasil

kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam mengambil Keputusan desa dan merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan lebih demokratis, transparan, dan berkeadilan.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk membuat suatu fakta dapat dipahami, dan seringkali tidak terlalu menekankan pada penarikan kesimpulan atau tidak menekankan pada perkiraan (prediksi) dari berbagai pola. Maka metode penelitian kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ini melalui pendekatan yang berfokus pada pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial dengan berbagai pandangan serta mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap partisipasi masyarakat desa dalam proses kebijakan publik Di Desa Perkebunan Gelugur Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik di desa berlangsung sangat aktif dan menentukan. Setiap keputusan pembangunan diawali dari musyawarah di tingkat dusun yang dipimpin oleh kepala dusun, kemudian dibahas lebih lanjut di kantor desa bersama perangkat desa, Babinsa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda. Keputusan baru dapat ditetapkan apabila seluruh peserta musyawarah menyatakan persetujuannya. Keterlibatan masyarakat terlihat jelas, terutama dalam proses pembangunan fisik dan kegiatan pemberdayaan, karena pekerjaan dilaksanakan oleh warga desa sendiri, bukan tenaga dari luar. Program-program desa juga diorganisir dalam bentuk tim perencanaan yang beranggotakan perwakilan dari setiap dusun. Namun, partisipasi masyarakat kadang menghadapi kendala seperti perbedaan pendapat (pro dan kontra), rendahnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme bantuan, serta kesibukan warga yang mayoritas bekerja di kebun sehingga pekerja pembangunan biasanya diambil dari

warga yang tidak bekerja di kebun. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa masih tergolong baik, karena pemerintah desa secara rutin melakukan sosialisasi melalui kegiatan keagamaan, perwiridan, serta pertemuan informal setiap malam Jumat. Sosialisasi ini digunakan untuk memberikan himbauan terkait administrasi desa dan mengajak masyarakat mendukung program pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa tergolong sangat antusias, terlihat dari tingginya keikutsertaan dalam kegiatan tahunan seperti Festival Muharram, lomba anak-anak, program PKK termasuk TOGA, serta berbagai kegiatan pemberdayaan. Pemerintah desa juga menjalankan lima bidang program utama, yaitu pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pembinaan keagamaan, dan penanggulangan bencana. Meskipun demikian, tidak semua usulan dapat direalisasikan setiap tahun karena keterbatasan anggaran; dari sepuluh usulan, biasanya hanya lima yang dapat diwujudkan, sementara sisanya dilanjutkan ke tahun berikutnya melalui proses Musrembang Desa.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa mekanisme musyawarah, gotong royong, dan kepercayaan masyarakat menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pembangunan desa, meskipun masih terdapat hambatan yang perlu ditangani melalui peningkatan pemahaman dan koordinasi masyarakat. Desa Perkebunan Gelugur merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang dikenal sebagai desa dengan karakteristik masyarakat agraris. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dan buruh kebun, sehingga aktivitas utama masyarakat sangat dipengaruhi oleh sektor perkebunan. Desa ini memiliki struktur sosial yang kuat, ditandai dengan budaya gotong royong, musyawarah, serta hubungan antarwarga yang harmonis. Pemerintahan desa berjalan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, serta perangkat desa dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam perkembangan desa, Perkebunan Gelugur aktif melaksanakan berbagai

program desa seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pembinaan keagamaan, serta program penanggulangan bencana melalui dana desa. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa terbilang tinggi, terlihat dari antusiasme mengikuti kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya seperti festival Muharram, kegiatan PKK, serta program tanaman obat keluarga. Meskipun menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran dan pemahaman masyarakat terkait administrasi bantuan, Desa Perkebunan Gelugur tetap menunjukkan upaya kuat menuju kemajuan melalui musyawarah, kerja sama, dan pemanfaatan potensi lokal.

2. Pembahasan

a. Bentuk partisipasi masyarakat Desa dalam proses kebijakan publik di Desa Perkebunan Gelugur, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat

Bentuk partisipasi masyarakat Desa Perkebunan Gelugur dalam proses kebijakan publik terlihat melalui keterlibatan aktif warga pada setiap tahapan pengambilan keputusan, terutama dalam forum

musyawarah desa. Proses dimulai dari musyawarah di tingkat dusun yang dipimpin oleh kepala dusun, kemudian dibawa ke kantor desa untuk dibahas bersama perangkat desa, Babinsa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda sebelum keputusan akhir ditetapkan. Keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas kehadiran dalam forum musyawarah, tetapi juga berupa pemberian saran, pendapat, serta masukan mengenai kebutuhan pembangunan, program pemberdayaan, maupun penentuan prioritas penggunaan dana desa. Partisipasi dalam tahap pelaksanaan juga sangat kuat, karena pembangunan fisik maupun program pemberdayaan dilaksanakan langsung oleh warga desa, bukan oleh tenaga dari luar. Melalui sistem gotong royong, masyarakat memberikan kontribusi tenaga, waktu, bahkan keahlian sesuai kemampuan, sementara tim pelaksana pembangunan dibentuk berdasarkan perwakilan tiap dusun sehingga setiap wilayah memiliki peran yang jelas. Selain itu, masyarakat juga berpartisipasi dalam bentuk pengawasan dan evaluasi program desa. Warga turut memantau jalannya

pembangunan, memberi kritik apabila ditemukan ketidaksesuaian, dan meminta transparansi penggunaan anggaran terutama terkait dana desa. Pemerintah desa secara rutin melakukan sosialisasi melalui kegiatan keagamaan, wirid, dan pertemuan informal setiap malam Jumat untuk menyampaikan informasi dan himbauan terkait administrasi, program desa, serta keputusan-keputusan penting. Tingkat partisipasi masyarakat juga tampak dari antusiasme dalam mengikuti kegiatan-kegiatan desa seperti Festival Muharram, program PKK, kegiatan TOGA, dan pelatihan pemberdayaan. Meskipun demikian, partisipasi masih menghadapi beberapa kendala seperti perbedaan pendapat (pro dan kontra), rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme bantuan, serta kesibukan warga yang mayoritas bekerja di kebun sehingga sebagian kurang optimal hadir dalam musyawarah. Namun secara keseluruhan, bentuk partisipasi masyarakat di Desa Perkebunan Gelugur menunjukkan bahwa warga memiliki peran penting dan nyata dalam perumusan, pelaksanaan, hingga pengawasan kebijakan publik desa, sehingga

pembangunan yang dijalankan tetap berlandaskan aspirasi dan kebutuhan lokal.

Selain partisipasi dalam musyawarah, pelaksanaan, dan pengawasan, masyarakat Desa Perkebunan Gelugur juga menunjukkan bentuk partisipasi melalui dukungan sosial dan budaya yang turut memperkuat keterlibatan mereka dalam kebijakan publik. Dukungan ini tampak dari kebiasaan warga yang saling menginformasikan kegiatan desa, mengajak tetangga untuk menghadiri musyawarah, serta menjaga kerukunan agar keputusan yang dihasilkan dapat diterima bersama. Partisipasi sosial seperti kegiatan keagamaan, perkumpulan wirid, hingga interaksi sehari-hari menjadi media efektif bagi pemerintah desa untuk menyampaikan informasi dan menyerap aspirasi masyarakat secara tidak formal. Melalui hubungan sosial yang harmonis ini, partisipasi masyarakat tidak hanya terwujud secara struktural lewat forum resmi, tetapi juga terbentuk secara kultural melalui nilai kebersamaan dan gotong royong yang telah mengakar lama di desa. Kondisi ini membuat masyarakat merasa memiliki desa dan merasa bertanggung jawab terhadap

arah pembangunan, sehingga pelaksanaan kebijakan publik dapat berjalan lebih lancar dan disambut dengan antusias oleh berbagai kelompok masyarakat.

b. Tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat pada proses kebijakan public

Pemerintah Desa Perkebunan Gelugur menghadapi berbagai tantangan dalam mengupayakan partisipasi masyarakat yang aktif dan merata pada proses kebijakan publik. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai mekanisme musyawarah desa, alur perumusan kebijakan, serta pentingnya keterlibatan warga dalam setiap tahapan pembangunan. Banyak warga yang masih beranggapan bahwa urusan pemerintahan desa sepenuhnya merupakan tanggung jawab aparat desa, sehingga mereka enggan menyampaikan pendapat atau berinisiatif untuk terlibat lebih jauh. Kurangnya literasi administrasi dan pemahaman tentang prosedur bantuan juga menimbulkan kesalahpahaman, misalnya terkait penyaluran bantuan dan prioritas program desa, yang membuat

sebagian warga bersikap pasif atau cenderung mengkritik tanpa memahami dasar kebijakan tersebut.

Selain itu, tingkat kesibukan masyarakat menjadi kendala signifikan. Mayoritas penduduk Desa Perkebunan Gelugur bekerja sebagai petani dan buruh kebun, sehingga waktu mereka banyak tersita untuk pekerjaan di ladang. Hal ini menyebabkan banyak warga tidak dapat hadir dalam musyawarah atau kegiatan desa lainnya karena harus bekerja menghidupi keluarga. Dalam beberapa situasi, hanya warga yang tidak bekerja di kebun yang dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan, sehingga representasi partisipasi belum sepenuhnya merata. Perbedaan kepentingan, pro dan kontra antarwarga, serta dinamika sosial juga menjadi hambatan, terutama ketika program desa menyangkut bantuan atau pembagian kerja. Faktor faktor ini terkadang memicu kesalahpahaman dan menimbulkan perbedaan pendapat yang mempengaruhi kelancaran proses musyawarah.

Pemerintah Desa Perkebunan Gelugur menghadapi berbagai tantangan dalam mengupayakan partisipasi masyarakat yang aktif dan

merata pada proses kebijakan publik. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai mekanisme musyawarah desa, alur perumusan kebijakan, serta pentingnya keterlibatan warga dalam setiap tahapan pembangunan. Banyak warga yang masih beranggapan bahwa urusan pemerintahan desa sepenuhnya merupakan tanggung jawab aparat desa, sehingga mereka enggan menyampaikan pendapat atau berinisiatif untuk terlibat lebih jauh. Kurangnya literasi administrasi dan pemahaman tentang prosedur bantuan juga menimbulkan kesalahpahaman, misalnya terkait penyaluran bantuan dan prioritas program desa, yang membuat sebagian warga bersikap pasif atau cenderung mengkritik tanpa memahami dasar kebijakan tersebut. Selain itu, tingkat kesibukan masyarakat menjadi kendala signifikan. Mayoritas penduduk Desa Perkebunan Gelugur bekerja sebagai petani dan buruh kebun, sehingga waktu mereka banyak tersita untuk pekerjaan di ladang. Hal ini menyebabkan banyak warga tidak dapat hadir dalam musyawarah atau kegiatan desa lainnya karena harus

bekerja menghidupi keluarga. Dalam beberapa situasi, hanya warga yang tidak bekerja di kebun yang dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan, sehingga representasi partisipasi belum sepenuhnya merata. Perbedaan kepentingan, pro dan kontra antarwarga, serta dinamika sosial juga menjadi hambatan, terutama ketika program desa menyangkut bantuan atau pembagian kerja. Faktor faktor ini terkadang memicu kesalahpahaman dan menimbulkan perbedaan pendapat yang mempengaruhi kelancaran proses musyawarah.

c. Pengaruh partisipasi masyarakat desa dalam proses kebijakan publik di Desa Perkebunan Gelugur, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat

Partisipasi masyarakat memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kualitas kebijakan publik di Desa Perkebunan Gelugur. Keterlibatan warga dalam musyawarah (Mulai dari tingkat dusun hingga musyawarah desa) membuat kebijakan yang dihasilkan lebih mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Aspirasi warga yang disampaikan dalam forum tersebut menjadi dasar pemerintah desa dalam

menentukan prioritas pembangunan, seperti perbaikan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan kegiatan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin besar pula kemungkinan kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi lapangan dan harapan warga desa. Keterlibatan aktif masyarakat juga memperkuat legitimasi kebijakan publik, karena keputusan diambil melalui kesepakatan bersama, bukan hanya hasil pertimbangan pemerintah desa.

Selain menentukan arah kebijakan, partisipasi masyarakat juga mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program desa. Karena sebagian besar kegiatan pembangunan dilaksanakan oleh warga setempat, mulai dari kerja fisik hingga pengawasan, program dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Misalnya, pembangunan fasilitas desa dilakukan oleh tim yang terdiri dari perwakilan setiap dusun, sehingga muncul rasa tanggung jawab kolektif untuk menyelesaikan setiap pekerjaan secara tepat waktu dan tepat mutu. Kondisi ini memperlihatkan bahwa partisipasi bukan hanya memberikan dampak pada perumusan kebijakan, tetapi

juga memastikan berjalannya program secara optimal. Ketika masyarakat merasa dilibatkan, mereka menunjukkan rasa memiliki terhadap kebijakan tersebut dan bersedia mendukung pelaksanaan program desa.

Pengaruh partisipasi juga terlihat pada aspek transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa. Melalui penyampaian pendapat, kontrol sosial, dan permintaan informasi dari warga, pemerintah desa terdorong untuk menjalankan program secara terbuka dan akuntabel. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan, termasuk permintaan laporan kegiatan atau penggunaan anggaran, membantu meminimalisir penyalahgunaan wewenang serta memastikan program dijalankan sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat berperan penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Partisipasi masyarakat juga memberikan pengaruh sosial–kultural yang positif. Tingginya antusiasme warga dalam mengikuti kegiatan desa seperti Festival Muharram, program PKK, penanaman TOGA, serta

kegiatan keagamaan mencerminkan adanya rasa kebersamaan dan solidaritas. Hal ini berdampak pada meningkatnya kesadaran kolektif bahwa pembangunan desa adalah tanggung jawab semua warga, bukan hanya pemerintah desa. Kesadaran ini membuat masyarakat lebih terbuka terhadap inovasi dan program baru yang direncanakan pemerintah desa, seperti program ketahanan pangan yang telah disosialisasikan dan mulai diterapkan oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas, relevansi, dan keberlanjutan kebijakan publik di Desa Perkebunan Gelugur. Semakin kuat partisipasi, semakin tinggi pula kualitas kebijakan yang dilahirkan, semakin efektif pelaksanaannya, dan semakin besar rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Sebaliknya, apabila partisipasi rendah, kebijakan berpotensi tidak tepat sasaran, pelaksanaan program kurang berjalan maksimal, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat menurun. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat bukan hanya pelengkap dalam proses kebijakan publik, tetapi merupakan faktor penentu yang sangat

mempengaruhi keberhasilan pembangunan desa.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Kebijakan Publik di Desa Perkebunan Gelugur Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas dan keberhasilan kebijakan publik di desa. Partisipasi warga terlihat melalui keterlibatan aktif mereka dalam musyawarah di tingkat dusun hingga musyawarah desa, pemberian usulan terhadap program pembangunan, serta pelaksanaan kegiatan melalui gotong royong dan kerja sama dalam pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat. Namun, pemerintah desa masih menghadapi beberapa kendala dalam mendorong partisipasi yang lebih optimal, seperti rendahnya pemahaman sebagian warga mengenai mekanisme kebijakan, tingkat kesibukan masyarakat dalam pekerjaan sehari-hari, serta keterbatasan informasi yang diterima oleh masyarakat terkait aturan dan

prosedur bantuan desa. Meskipun demikian, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa masih cukup baik, yang menjadi modal sosial dalam proses pembangunan. Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat berpengaruh besar terhadap relevansi kebijakan yang dihasilkan, efektivitas pelaksanaan program, serta tingkat keberlanjutan pembangunan desa. Tingginya partisipasi masyarakat menjadikan kebijakan desa lebih tepat sasaran, lebih mudah dilaksanakan, serta mendapatkan dukungan luas dari warga. Dengan demikian, partisipasi masyarakat bukan hanya pelengkap dalam kebijakan publik, tetapi merupakan penentu keberhasilan pembangunan desa secara menyeluruh..

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka ditulis mengacu kepada standar APA 6th dengan panduan sebagai berikut :

Buku :

Pradhan, Menno, et al. "Improving educational quality through enhancing community participation: Results from a randomized field experiment in Indonesia." *American Economic Journal: Applied Economics* 6.2 (2014): 105-126.

World Bank (2023). Village Governance, Politics, and Participation in Indonesia (report)

Jurnal :

Akbar, A. (2020). Participatory planning practice in rural Indonesia (Musrenbang at village level). Journal article.

Arifai, M. (2022). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Dana Desa (studi kasus). JMPKN / jurnal.

Aspinall, E. (2025). Analysing and explaining variation in village governance across Indonesia. (artikel akademik).

Dulkiah, Moh, et al. "Community Participation Forms in Indonesian Villages to Support the Sustainable Development Goals Program." Journal of Law and Sustainable Development 11.11 (2023): e2061-e2061.

Fachrun, M. et al. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde. Villages Journal.

Fachrun, Muh, et al. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara." Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa. 1.2 (2020): 92-111.

Hakim, Lukman, et al. "Assessing Village Democracy and Welfare in Rural Indonesia: An Index-Based Correlation Analysis." Frontiers in Political Science 7 (2025): 1622507.

Harsanto, B. T. (2024). Investigating the keys to the failure of inter-village

collaboration for agrotourism membahas peran partisipasi komunitas lokal.

Hendrianto, Wisnu. "Improving the effectiveness of community participation in village fund program." Bappenas Working Papers 2.2 (2019): 215-222.

Junaedi, J. (2023). Implementation of Village Governance Based on Good Governance Principles. IJBLE / jurnal.

Kartika, R. S. (2012). Partisipasi masyarakat dalam mengelola alokasi dana desa (Badan Litbang Kemendagri).

Kusuma, Fanila Kasmita. "Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik Di Era Desentralisasi." Media Bina Ilmiah 18.9 (2024): 2505-2514.

Napitupulu, Bong Bong Prakoso. "Peran partisipasi publik dalam memperkuat demokrasi dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia." Jurnal Administrasi dan Pembangunan Internasional 4.2 (2024): 81-89.

Nugraha, IGP, dkk. "Peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Desa Tihingan, Bali, Indonesia." Jurnal Infrastruktur, Kebijakan, dan Pembangunan. 8.8 (2024): 4621.

Nuramal, Nuramal, et al. "Effect of Transparency, Accountability and Community Participation on Village Fund Management in Mamasa Regency." Journal of Management and Administration Provision 5.2 (2025): 308-321.

- Pamuji, Kadar, Abdul Aziz Nasihuddin, and Riris Ardhana Riswari. "Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa." *Jurnal Idea Hukum* 3.1 (2017): 493-506.
- Rahmah, Lathifah Aulia, et al. "COMMUNITY PARTICIPATION IN PREPARING THE VILLAGE GOVERNMENT WORKING PLAN." *Journal of Social Dynamics and Governance* 1.1 (2024): 37-50.
- Rosidin, Utang. "Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4.1 (2019): 168-184.
- Rosyadi, Ihyauddin, et al. "Transforming Village Governance: The Impact of Village Development Boards on Community Participation, Indonesian Case Study." *International Journal of Research in Engineering, Science and Management* 7.5 (2024): 187-194.
- Sitorus, Haposan. "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik: Tinjauan Dari Aspek Demokratisasi." *literacy notes* 1.2 (2023).
- Suarta, I. K. (2022). *The Community Participation in the Development of Gunung Salak Tourism Village (forms & level of participation)*.
- Tasuan, Venansius Mario, dan Desmon R. Manane. "Partisipasi Masyarakat, Transparansi, dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa Lada Mese, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Review Manajemen Publik dan Akuntansi* 5.1 (2024): 96-109.
- Yuliandari, Erna, and Sisca Meriani Wulandari. "Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa." *Sovereignty*. 1.4 (2022): 745-757.
- Yunus, Rabina. "Pembangunan Desa dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kebijakan Dana Desa: Kasus Partisipasi Masyarakat Desa di Kabupaten Luwu Timur." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 21.2: 231-243.
- Yustiyanto, Reza. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa." *Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan*. 4.1 (2025): 88-95.